

**STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
PPID PELAKSANA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. Tahapan dan Tata Cara Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan :
 - a. Sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;
 - b. Pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau
 - c. Pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner.
2. Pengujian konsekuensi dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;
 - b. Mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;
 - c. Menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;
 - d. Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.
3. Ketentuan mengenai format lembar pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada No. 2 tercantum dalam Lampiran lainnya yang tidak terpisahkan
4. Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan.
5. Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (No. 4) paling sedikit memuat :
 - a. Identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan;
 - c. Uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan;
 - d. Alasan pengecualian;
 - e. Jangka waktu pengecualian; dan

- f. Tempat dan tanggal penetapan.
6. Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada No. 5 huruf d paling sedikit memuat :
- a. Undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan
 - b. Analisis konsekuensi.
7. Ketentuan mengenai format Penetapan tentang Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada No. 5 tercantum dalam Lampiran lainnya yang tidak terpisahkan.